

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN HASIL PENGAWASAN APF



**INSPEKTORAT JENDERAL
RAKERKESNAS 2008
SURABAYA, OKTOBER 2008**



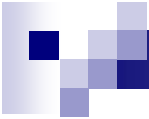
MASALAH LAPORAN KEUANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

- Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2004, 2005, dan 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan disclaimer / tidak memberikan pendapat apapun.
- LKPP merupakan rapor pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercayakan rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran/dana publik, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll).
- BMN /asset salah satu yang berkontribusi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah di Departemen Kesehatan

HAL-HAL STRATEGIS YG MEMPENGARUHI OPINI LAP.KEUANGAN DEPKES
PNBP, DANA DEKON DAN TUGAS PEMBANTUAN, **BARANG MILIK
KEKAYAAN NEGARA DAN PHLN**

Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi Penyebab yg paling besar
terjadinya **DISCLAIMER.**

Pengelola Satker lebih mementingkan pelaksanaan pengadaan dari pada
mengelola aset

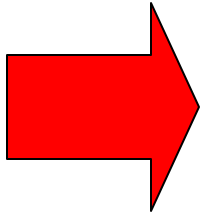


GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEBELUM REFORMASI BIDANG KEUANGAN

- Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya
- Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah.
- Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah
- Kurang adanya kesamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN.

Problematika pengelolaan aset negara menurut BPKP (2003)

- penataan kembali tertib administrasi dan penggunaan aset negara
- pengembangan *database* BMN yang akurat dan komprehensif
- pengamanan aset negara secara hukum dan/atau fisik.

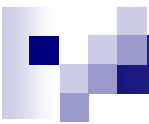


**BPKP DALAM RDP DENGAN DPR-RI 12 JUNI 2007
MENGUNGKAPKAN BAHWA ASSET NEGARA DIHAMPIR 90 %
LEMBAGA NEGARA BELUM DIKELOLA SECARA
PROFESIONAL, SEHINGGA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
BURUK.**



REFORMASI/PERUBAHAN DI BIDANG KEUANGAN

- UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
- UU NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
- PP NO 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
- KEPPRES NO 17 TAHUN 2007 TENTANG TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA



PENGELOLAAN ASSET NEGARA DALAM PENGERTIAN PP 6/2006

- **TIDAK SEKEDAR ADMINISTRATIF,
TETAPI LEBIH MAJU BERPIKIR DALAM
MENANGANI ASSET NEGARA,
DENGAN BAGAIMANA MENINGKATKAN
EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN
MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH DALAM
MENGELOLA ASSET**



PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA

- Arah penertiban BMN (inventarisasi dan penilaian) adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset-aset negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat / *stake-holder*.
- Pengelolaan aset negara memberikan acuan bahwa aset negara harus digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan dimungkinkannya fungsi budgeter dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara.
- Penanganan aset negara yang mengikuti kaidah-kaidah tata kelola yang baik / *good governance* akan menjadi salah satu modal dasar yang penting dalam penyusunan LKPP yang akuntabel.



SUBYEK PENERTIBAN BMN

- BMN yang belum dicatat atau disertifikasi atau digunakan/dimanfaatkan;
- BMN yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- BMN yang berasal dari kekayaan negara lainnya (KLN);
- Barang Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS).



PERAN PENERTIBAN BMN

- Penertiban BMN diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh aset negara, baik itu yang bersumber dari APBN maupun dari sumber perolehan lainnya yang sah.
- Ketersediaan *database* BMN yang komprehensif dan akurat dapat segera terwujud.
- *Database* BMN akan memainkan peran yang strategis dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kebutuhan barang nasional oleh Pengelola Barang dan usulan alokasi penganggarnya dalam APBN.
- Akan terjadi hubungan sinergis antara perencana anggaran (DJA) dengan pengelola barang (DJKN) untuk duduk satu meja merumuskan dan menentukan besaran rencana kebutuhan barang milik negara secara nasional dalam tahun anggaran, sehingga anggaran belanja modal fisik tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan barang /aset yang nyata sesuai kondisi di lapangan dan mampu menciptakan anggaran belanja modal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tidak hanya bersifat *incremental*.

HASIL INVENTARISASI BMN TAHUN 2008

TAHAP I - III

NO.	PROVINSI	JUMLAH SATKER	SATKER YANG SUDAH DI INVENTARISIR	NILAI BMN MENURUT ADMINISTRASI	NILAI BMN MENURUT INVENTARISASI	SELISIH
1	DKI JAKARTA			-	-	-
2	JAWA BARAT	68	16	189.790.299.445	188.296.885.345	1.493.414.100
3	JAWA TENGAH	99	30	283.429.375.186	199.548.449.445	83.880.925.741
4	DIY	19	17	175.304.257.595	106.426.468.316	68.877.789.279
5	JAWA TIMUR	84	53	351.174.630.189	382.505.708.548	(31.331.078.359)
6	NAD	42	16	110.776.221.317	92.822.894.887	17.953.326.430
7	SUMUT	52	32	343.946.084.115	370.805.232.927	(26.859.148.812)
8	SUMBAR	66	40	184.450.418.769	227.583.546.441	(43.133.127.672)
9	RIAU	31	15	84.636.167.093	59.329.839.900	25.306.327.193
10	JAMBI	43	22	78.011.830.493	74.538.933.639	3.472.896.854
11	SUMSEL	40	25	167.906.593.690	163.821.360.031	4.085.233.659
12	LAMPUNG	23	7	41.704.533.781	45.722.599.702	(4.018.065.921)
13	KALBAR	60	43	70.690.714.595	71.934.550.700	(1.243.836.105)
14	KALTENG	33	17	127.515.151.852	130.065.402.734	(2.550.250.882)
15	KALSEL	36	11	63.504.017.919	69.502.305.270	(5.998.287.351)
16	KALTIM	42	17	54.572.308.785	55.534.936.257	(962.627.472)
17	SULUT	26	18	113.430.397.709	118.491.327.193	(5.060.929.484)
18	SULTENG	32	23	167.174.829.417	158.203.469.833	8.971.359.584
19	SULSEL	58	22	321.369.519.660	321.678.859.785	(309.340.125)
20	SULTRA	24	20	128.432.813.437	76.061.830.741	52.370.982.696

NO.	PROVINSI	JUMLAH SATKER	SATKER YANG SUDAH DI INVENTARISIR	NILAI BMN MENURUT ADMINISTRASI	NILAI BMN MENURUT INVENTARISASI	SELISIH
21	MALUKU	28	10	60.753.770.562	60.572.020.562	181.750.000
22	BALI	31	0	184.953.942.470	184.293.009.103	660.933.367
23	NTB	36	26	95.433.591.226	95.436.566.226	(2.975.000)
24	NTT	52	18	72.554.781.422	72.554.782.863	(1.441)
25	PAPUA	26	14	79.526.018.995	76.596.174.122	2.929.844.873
26	BENGKULU	28	28	162.249.440.673	156.335.260.421	5.914.180.252
27	MALUT	19	15	141.684.021.587	141.684.021.593	(6)
28	BANTEN	18	16	193.325.431.276	121.543.648.079	71.781.783.197
29	BABEL	22	14	46.277.212.589	46.847.921.146	(570.708.557)
30	GORONTALO	21	17	61.845.319.202	72.968.300.133	(11.122.980.931)
31	KEPRI	18	16	71.207.165.236	67.429.882.039	3.777.283.197
32	IRJABAR	20	12	36.946.588.065	36.581.136.679	365.451.386
33	SULBAR	23	20	55.559.799.630	54.200.235.914	1.359.563.716
TOTAL		1220	650	4.320.137.247.981	4.099.917.560.575	220.219.687.406

MASALAH-MASALAH DALAM RANGKA INVENTARISASI DITEMUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

A. PENGELOLAAN BMN

1. Jenis barang tidak diketahui nilai harganya
2. Penetapan harga barang pada laporan tidak berdasarkan berita acara penyerahan barang
3. Nilai barang berdasarkan kontrak belum masuk dalam SABMN
4. Barang tidak tercatat karena tidak ada serah terima dari pusat
5. Barang/asset belum tercatat dan masuk dalam SABMN
6. Belum melaksanakan pengelolaan BMN
7. Jumlah Satker tahun 2007 sebanyak 1304 dan tersebar di 33 propinsi yg memerlukan tingkat intensitas koordinasi dan komunikasi yang tinggi agar pemrosesan BMN dapat diterbitkan tepat waktu dan tepat kualitas.

B. SDM

1. Staf pelaksana belum seluruhnya mendapat pelatihan
2. Kesalahan entry data
3. Pengelola/pelaksana yang terlatih sering diganti

C. ORGANISASI

1. Tim inventarisasi belum dibentuk pada semua satker
2. Unit pengelola SAI tidak menjalankan fungsinya dengan baik
3. Belum jalannya fungsi pengelola SABMN yang melekat pada Struktur organisasi yang ada

UPAYA YANG PERLU DITINDAKLANJUTI (rekomendasi)

- **MENGGERAKKAN JALANNYA FUNGSI PENGELOLA BMN DALAM STRUKTUR ORGANISASI YANG ADA**
- **MENETAPKAN SK PENGELOLA/PETUGAS SAI**
- **MELAKUKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN SESUAI KETENTUAN**
- **MELENGKAPI ASSET DENGAN DOKUMEN YANG MEMADAI, SEPERTI NILAI PEROLEHAN/ HARGA**
- **MENGIKUTSERTAKAN PENGELOLA/PETUGAS PELATIHAN SABMN**
- **MEMPERBAIKI PENCATATAN DAN PELAPORAN BMN DAN MELAKSANAKAN SABMN**
- **SELURUH ASSET YG DIDAPAT DARI APBN DAN HIBAH/ PLN HARUS DICATAT DALAM APLIKASI SABMN**
- **BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MAUPUN FAKTUR PENGIRIMAN BARANG HARUS DIGUNAKAN SEBAGAI KELENGKAPAN DOKUMEN BARANG.**
- **HASIL PEMERIKSAAN JOINT ANTARA ITJEN DAN BPKP INVENTARISASI BMN HARUS SEGERA DITINDAKLANJUTI**
- **BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN HARUS SECARA TERUS MENERUS MELAKUKAN PEMBINAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN, TERMASUK MUTASI BMN**



HASIL PENGAWASAN APF SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

RAKERKESNAS OKTOBER 2008

REKAPITULASI TEMUAN HASWAS ITJEN DEPKES TAHUN 2000-2008 MENURUT PROVINSI

NO.	PROVINSI	JUMLAH				TINDAK LANJUT				SALDO			
		LHP	TM	SRN	KN	LHP	TM	SRN	KN	LHP	TM	SRN	KN
1	DKI Jakarta	128	481	1,208	6,497,584,944	106	423	1,067	3,027,142,841	22	58	141	3,470,442,103.00
2	Jawa Barat	160	573	1,445	6,698,253,112	128	485	1,191	2,715,122,104	32	88	254	3,983,131,008.00
3	Jawa Tengah	112	440	1,081	10,030,487,408	89	391	958	9,974,475,690	23	49	123	56,011,718.00
4	DI Yogyakarta	68	254	614	6,734,244,514	65	247	602	6,614,288,114	3	7	12	119,956,400.00
5	Jawa Timur	89	323	795	9,803,098,120	70	291	721	1,718,461,302	19	32	74	8,084,636,818.39
6	N. Aceh Darussalam	9	24	84	473,383,981	2	8	40	-	7	16	44	473,383,981.00
7	Sumatera Utara	59	185	479	8,285,867,622	45	161	431	8,227,664,122	14	24	48	58,203,500.00
8	Sumatera Barat	46	178	443	2,179,535,131	42	165	429	2,175,737,856	4	13	14	3,797,275.00
9	Riau	46	171	415	45,356,436	35	144	359	32,087,317	11	27	56	13,269,118.55
10	Jambi	42	160	389	493,195,507	33	140	340	23,893,155	9	20	49	469,302,352.00
11	Sumatera Selatan	49	202	498	146,718,250	35	162	423	46,818,104	14	40	75	99,900,146.35
12	Lampung	44	161	385	41,105,321	40	152	370	24,357,821	4	9	15	16,747,500.00
13	Kalimantan Barat	38	129	305	23,286,748	30	109	265	20,806,748	8	20	40	2,480,000.00
14	Kalimantan Tengah	31	109	307	41,900,039	23	80	236	41,900,039	8	29	71	-
15	Kalimantan Selatan	49	159	395	240,422,566	44	149	387	179,084,171	5	10	8	61,338,395.00

16	Kalimantan Timur	33	116	277	7,011,360	25	102	240	7,011,360	8	14	37	-
17	Sulawesi Utara	43	156	406	450,945,560	16	75	190	6,316,060	27	81	216	444,629,500.00
18	Sulawesi Tengah	30	104	311	370,015,537	19	72	241	134,278,150	11	32	70	235,737,387.00
19	Sulawesi Selatan	53	224	586	35,740,853,331	31	149	410	733,445,650	22	75	176	35,007,407,681.00
20	Sulawesi Tenggara	30	108	312	77,127,206	20	83	250	26,072,484	10	25	62	51,054,721.73
21	Maluku	16	73	254	406,667,577	6	33	125	12,408,034	10	40	129	394,259,543.20
22	Bali	46	160	378	212,139,979	31	109	265	211,183,729	15	51	113	956,250.00
23	NTB	47	148	344	201,482,328	42	143	337	196,672,328	5	5	7	4,810,000.00
24	NTT	39	138	389	226,433,240	25	95	254	168,612,995	14	43	135	57,820,245.00
25	Papua	9	45	154	18,661,350	2	13	61	14,161,350	7	32	93	4,500,000.00
26	Bengkulu	37	149	379	847,687,398	27	116	302	268,780,598	10	33	77	578,906,800.00
27	Maluku Utara	23	110	341	1,503,994,751	9	49	181	318,753,060	14	61	160	1,185,241,691.35
28	Banten	31	93	253	157,196,699	19	61	157	112,543,480	12	32	96	44,653,219.00
29	Bangka Belitung	18	60	174	135,339,870	7	25	80	25,497,370	11	35	94	109,842,500.00
30	Gorontalo	12	45	129	265,957,601	5	25	79	85,645,744	7	20	50	180,311,856.53
31	Kepulauan Riau	17	55	149	169,556,229	10	35	98	789,200	7	20	51	168,767,029.00
32	Sulawesi Barat	8	24	61	12,825,000	-	5	19	-	8	19	42	12,825,000.00
33	Irian Jaya Barat	12	35	118	845,546,950	2	15	47	9,450,000	10	20	71	836,096,950.00
	JUMLAH PROPINSI	1,474	5,392	13,858	93,383,881,664.28	1,083	4,312	11,155	37,153,460,975.18	391	1,080	2,703	56,230,420,689.10
	PUSAT	174	685	1,644	3,566,932,461	144	575	1,376	1,187,726,763	30	110	268	2,379,205,698.00
	JUMLAH	1,648	6,077	15,502	96,950,814,125.63	1,227	4,887	12,531	38,341,187,738.53	421	1,190	2,971	58,609,626,387.10
	PROSENTASI TL TERHADAP JUMLAH AWAL (%)					74.5	80.4	80.8	39.5				

REKAPITULASI TEMUAN HASWAS ITJEN DEPKES TAHUN 2000-2008 MENURUT UNIT UTAMA

NO.	UNIT UTAMA	JUMLAH				TINDAK LANJUT				SALDO			
		LHP	TM	SRN	KN	LHP	TM	SRN	KN	LHP	TM	SRN	KN
1	Sekretariat Jenderal	300	1,191	2,680	2,175,116,709	261	1,084	2,424	1,763,710,709	39	107	256	411,406,000.00
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Ditjen Binakesmas	261	943	2,418	2,680,981,215	216	789	2,033	1,639,073,500	45	154	385	1,041,907,715.20
4	Ditjen Yanmedik	498	1,674	4,570	84,363,170,527	312	1,180	3,246	33,021,610,880	186	494	1,324	51,341,559,646.78
5	Ditjen P2 & PL	294	1,110	2,843	4,222,271,859	212	886	2,348	367,668,132	82	224	495	3,854,603,726.73
6	Ditjen Yanfar	12	46	125	731,737,005	5	22	60	899,850	7	24	65	730,837,155.00
7	Badan Litbangkes	29	126	304	703,868,770	24	104	243	64,933,990	5	22	61	638,934,780.00
8	Badan PPSPDMK	241	950	2,494	2,073,668,041	184	785	2,109	1,483,290,678	57	165	385	590,377,363.39
9	BPOM	13	37	68	-	13	37	68	-				
	JUMLAH	1,648	6,077	15,502	96,950,814,125.63	1,227	4,887	12,531	38,341,187,738.53	421	1,190	2,971	58,609,626,387.10
	PROSENTASI TL TERHADAP JUMLAH AWAL (%)					74.5	80.4	80.8	39.5				

REKAPITULASI TEMUAN HASWAS BPKP TAHUN 2000-2008 MENURUT PROVINSI

No	PROVINSI	Awal				Tindak Lanjut				Saldo			
		LHP	Temuan	Saran	KN	LHP	Temuan	Saran	KN	LHP	Temuan	Saran	KN
1	DKI JAKARTA I	14	24	27	1,838,353,131.00	9	10	11	1,007,280,113.00	5	14	16	831,073,018.00
	DKI JAKARTA II	18	75	74	2,586,836,555.00	11	41	41	390,120,509.00	7	34	33	2,196,716,046.00
2	Jawa Barat	89	204	242	1,658,782,109.84	76	181	212	931,340,782.10	13	23	30	727,441,327.74
3	Jawa Tengah	92	223	325	9,407,755,311.84	55	151	222	6,823,733,632.33	37	72	103	2,584,021,679.51
4	DI Yogyakarta	62	87	120	1,603,560,815.82	52	69	95	338,376,195.62	10	18	25	1,265,184,620.20
5	Jawa Timur	96	205	243	3,863,756,331.76	76	175	209	3,600,913,939.76	20	30	34	262,842,392.00
6	N. Aceh Darussalam	30	14	10	64,794,008.10	23	5	5	50,299,816.00	7	9	5	14,494,192.10
7	Sumatera Utara	97	168	183	1,966,310,213.13	62	105	113	1,502,982,111.35	35	63	70	463,328,101.78
8	Sumatera Barat	83	260	366	7,802,539,721.41	43	136	186	2,230,062,857.55	40	124	180	5,572,476,863.86
9	Riau	21	64	82	396,624,022.97	1	5	6	11,199,406.45	20	59	76	385,424,616.52
10	Jambi	82	223	258	4,810,738,192.45	46	110	128	847,382,889.41	36	113	130	3,963,355,303.04
11	Sumatera Selatan	75	131	172	887,675,930.88	49	50	72	377,890,921.70	26	81	100	509,785,009.18
12	Lampung	84	214	352	2,336,012,812.58	57	132	220	1,212,823,132.32	27	82	132	1,123,189,680.26
13	Kalimantan Barat	62	113	129	6,473,273,713.00	25	41	45	925,144,184.00	37	72	84	5,548,129,529.00
14	Kalimantan Tengah	29	55	61	2,119,640,801.30	7	5	5	1,507,256,063.65	22	50	56	612,384,737.65
15	Kalimantan Selatan	29	59	64	506,135,451.42	15	8	9	23,565,738.01	14	51	55	482,569,713.41
16	Kalimantan Timur	101	183	214	3,446,657,627.94	41	45	50	876,112,638.67	60	138	164	2,570,544,989.27

No	PROVINSI	Awal				Tindak Lanjut				Saldo			
		LHP	Temuan	Saran	KN	LHP	Temuan	Saran	KN	LHP	Temuan	Saran	KN
17	Sulawesi Utara	33	76	119	203,375,940.00	21	55	94	176,802,572.00	12	21	25	26,573,368.00
18	Sulawesi Tengah	38	105	135	786,145,948.45	12	42	46	216,070,150.00	26	63	89	570,075,798.45
19	Sulawesi Selatan	84	199	211	2,565,070,576.95	29	78	80	1,147,367,367.44	55	121	131	1,417,703,209.51
20	Sulawesi Tenggara	23	84	123	917,331,812.55	4	20	22	490,472,074.98	19	64	101	426,859,737.57
21	Maluku	8	11	12	-	3	-	-	-	5	11	12	-
22	Bali	38	123	147	411,020,373.81	19	57	68	146,320,095.68	19	66	79	264,700,278.13
23	NTB	30	111	153	484,774,609.46	16	65	93	298,805,314.00	14	46	60	185,969,295.46
24	NTT	56	156	199	3,913,283,819.34	15	44	50	1,171,228,282.53	41	112	149	2,742,055,536.81
25	Papua	8	13	15	72,539,200.00	-	-	-	-	8	13	15	72,539,200.00
26	Bengkulu	24	82	108	355,605,810.88	16	73	93	309,640,412.24	8	9	15	45,965,398.64
27	Maluku Utara	5	15	17	-	-	3	3	-	5	12	14	-
28	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bangka Belitung	27	25	26	76,848,452.00	23	14	14	60,778,923.00	4	11	12	16,069,529.00
30	Gorontalo	15	24	32	137,834,022.00	11	13	14	37,620,728.00	4	11	18	100,213,294.00
31	Kepulauan Riau	11	24	28	81,931,547.58	2	4	5	16,085,683.00	9	20	23	65,845,864.58
32	Sulawesi Barat	7	19	22	166,145,955.83	-	-	-	9,997,408.00	7	19	22	156,148,547.83
33	Irian Jaya Barat	13	32	32	135,872,293.15	-	-	-	-	13	32	32	135,872,293.15
	Jumlah Propinsi	1,484	3,401	4,301	62,077,227,112.44	819	1,737	2,211	26,737,673,941.79	665	1,664	2,090	35,339,553,170.65
34	Pusat	27	56	65	12,241,128,359.17	18	39	44	11,980,405,945.17	9	17	21	260,722,414.00
	Jumlah Propinsi + Pusat	1,511	3,457	4,366	74,318,355,471.61	837	1,776	2,255	38,718,079,886.96	674	1,681	2,111	35,600,275,584.65

REKAPITULASI TEMUAN HASWAS BPKP TAHUN 2000-2008 MENURUT UNIT ORGANISASI

No	Unit Utama	Awal				Tindak Lanjut				Saldo			
		LHP	Temuan	Saran	KN	LHP	Temuan	Saran	KN	LHP	Temuan	Saran	KN
1	SETJEN	281	487	620	11,798,755,651.55	171	267	347	9,996,126,313.21	110	220	273	1,802,629,338.34
2	BINA KESMAS	506	1,303	1,671	13,464,370,402.22	253	663	833	4,640,186,631.78	253	640	838	8,824,183,770.44
3	BINA YANMED	329	685	831	24,448,020,362.49	184	278	352	16,996,017,300.61	145	407	479	7,452,003,061.88
4	P2PL	129	298	411	1,250,021,413.61	96	214	295	907,235,292.04	33	84	116	342,786,121.57
5	BINA YANFAR	53	191	219	4,631,645,826.97	34	152	173	2,734,937,165.40	19	39	46	1,896,708,661.57
6	BADAN LITBANGKES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPPSDMK	213	493	614	18,725,541,814.77	99	202	255	3,443,577,183.92	114	291	359	15,281,964,630.85
JUMLAH UNIT UTAMA		1,511	3,457	4,366	74,318,355,471.61	837	1,776	2,255	38,718,079,886.96	674	1,681	2,111	35,600,275,584.65

REKAPITULASI TEMUAN HASWAS BPK-RI TAHUN 2000-2008 MENURUT PROVINSI

No	Provinsi	Awal				Tindak Lanjut				Saldo			
		Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)	Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)	Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)
1	DKI JAKARTA	39	9,605,319,639.34	21	106,642,851,175.86	1				38	9,605,319,639.34	21	106,642,851,175.86
2	JAWA BARAT	19	1,546,289,382.46	2	287,131,347.00	2				17	1,546,289,382.46	2	287,131,347.00
3	JAWA TENGAH	42	1,184,680,753.65	10	15,882,432,026.43	4				38	1,184,680,753.65	10	15,882,432,026.43
4	D.I. YOGYAKARTA	1	-	2	152,975,225.84					1	-	2	152,975,225.84
5	JAWA TIMUR	28	56,044,519.34	4	2,887,537,633.99					28	56,044,519.34	4	2,887,537,633.99
6	N. ACEH D	-	-	-	-					-	-	-	-
7	SUMATERA UTARA	47	4,687,360,275.28	58	137,811,882,096.57	6	-	4	126,189,154.29	41	4,687,360,275.28	54	137,685,692,942.28
8	SUMATERA BARAT	-	-	-	-					-	-	-	-
9	RIAU	21	381,030,976.30	22	32,367,489,126.34	2	3,634,090.37	1	338,217,949.00	19	377,396,885.93	21	32,029,271,177.34
10	JAMBI	-	-	-	-					-	-	-	-
11	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-					-	-	-	-
12	LAMPUNG	14	27,012,930.00	12	1,451,962,096.00	4	4,720,500.00			10	22,292,430.00	12	1,451,962,096.00
13	KALIMANTAN BARAT	20	95,065,108.00	46	19,623,996,951.60					20	95,065,108.00	46	19,623,996,951.60
14	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-					-	-	-	-
15	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-					-	-	-	-
16	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-					-	-	-	-

No	Provinsi	Awal				Tindak Lanjut				Saldo			
		Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)	Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)	Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)
17	SULAWESI UTARA	-	-	-	-					-	-	-	-
18	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-					-	-	-	-
19	SULAWESI SELATAN	67	3,090,784,053.00	84	428,989,910,731.82					67	3,090,784,053.00	84	428,989,910,731.82
20	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-					-	-	-	-
21	MALUKU	-	-	-	-					-	-	-	-
22	BALI	39	4,861,912,123.80	18	8,324,020,143.00	3				36	4,861,912,123.80	18	8,324,020,143.00
23	NTB	12	2,382,129.41	4	4,184,097,533.00					12	2,382,129.41	4	4,184,097,533.00
24	NTT	-	-	-	-					-	-	-	-
25	PAPUA	-	-	-	-					-	-	-	-
26	BENGKULU	-	-	-	-					-	-	-	-
27	MALUKU UTARA	-	-	-	-					-	-	-	-
28	BANTEN	2	-	8	2,534,783,753.00					2	-	8	2,534,783,753.00
29	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-					-	-	-	-
30	GORONTALO	-	-	-	-					-	-	-	-
31	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-					-	-	-	-
32	SULAWESI BARAT	-	-	-	-					-	-	-	-
33	IRIAN JAYA BARAT	-	-	-	-					-	-	-	-
JUMLAH DAERAH		351	25,537,881,890.58	291	761,141,069,840.45	22	8,354,590.37	5	464,407,103.29	329	25,529,527,300.21	286	760,676,662,737.16
PUSAT		371	367,752,755,188.94	307	7,981,827,287,361.98	143	43,062,019,746.71	49	1,188,943,832,059.26	228	324,690,735,442.23	258	6,792,883,455,302.72
JUMLAH		722	393,290,637,079.52	598	8,742,968,357,202.43	165	43,070,374,337.08	54	1,189,408,239,162.55	557	350,220,262,742.44	544	7,553,560,118,039.88

REKAPITULASI TEMUAN HASWAS BPK-RI TAHUN 2000-2008 MENURUT UNIT ORGANISASI

No	Unit Organisasi	Awal				Tindak Lanjut				Saldo			
		Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)	Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)	Srn	KN Murni (M)	Srn	Potensi (P)
1	Sekretariat Jenderal	593	380,489,036,611.86	426	7,958,443,755,554.08	146	42,959,604,337.08	47	1,166,448,593,555.55	447	337,529,432,274.78	379	6,791,995,161,998.53
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ditjen Bina Kesmas	7	68,245,854.00	27	477,094,969,184.00	-	-	-	-	7	68,245,854.00	27	477,094,969,184.00
4	Ditjen Bina Yanmedik	56	10,296,801,403.17	74	118,638,076,248.13	10	41,227,800.00	4	18,897,299,300.00	46	10,255,573,603.17	70	99,740,776,948.13
5	Ditjen P2 & PL	64	2,436,553,210.49	69	188,747,270,216.22	8	69,542,200.00	3	4,062,346,307.00	56	2,367,011,010.49	66	184,684,923,909.22
6	Ditjen Bina Farmasi & Alkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Litbangkes	-	-	2	44,286,000.00	-	-	-	-	-	-	2	44,286,000.00
8	BPPSDMK	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
JUMLAH		722	393,290,637,079.52	598	8,742,968,357,202.43	165	43,070,374,337.08	54	1,189,408,239,162.55	557	350,220,262,742.44	544	7,553,560,118,039.88

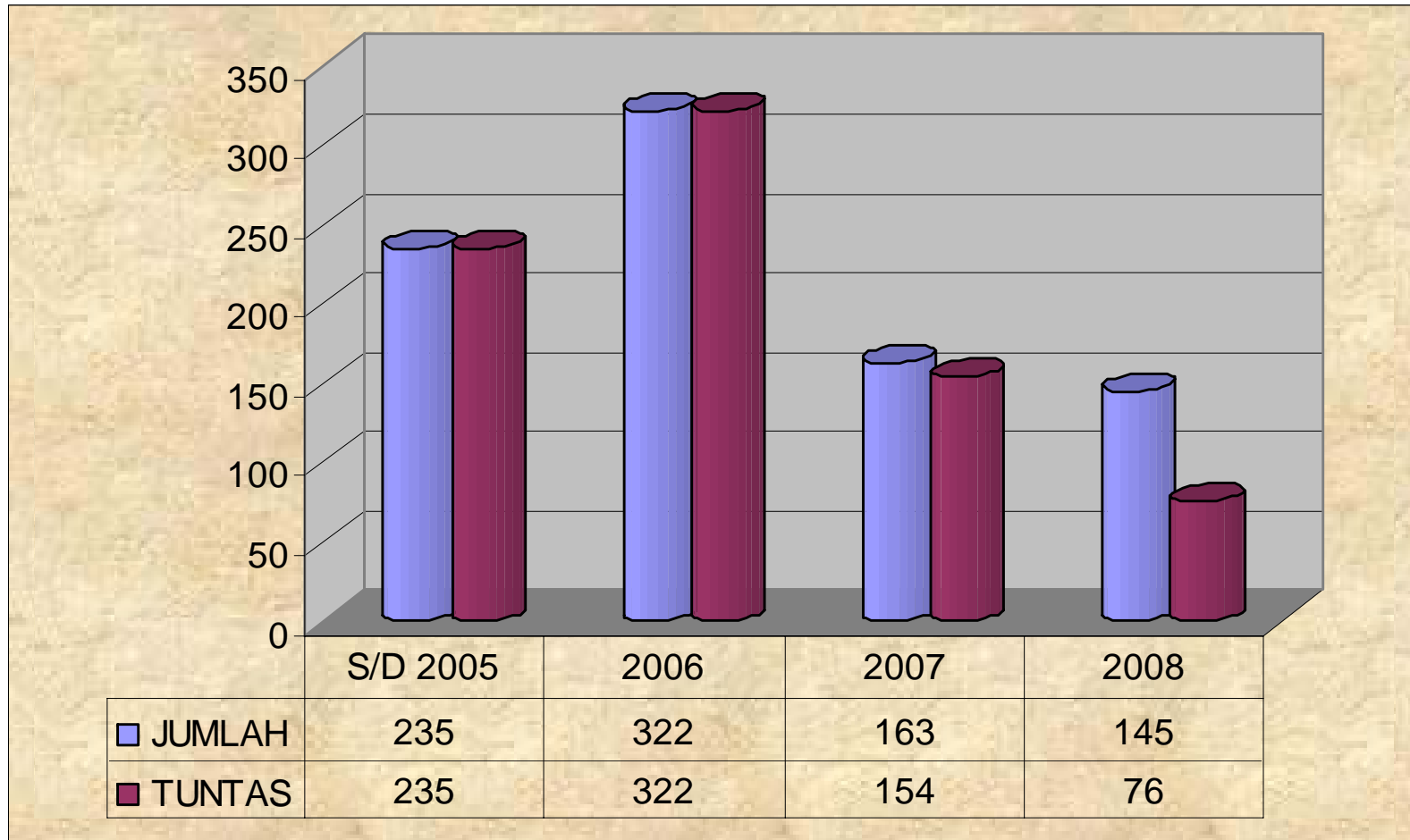
PENANGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT

NO	TAHUN	JUMLAH	TUNTAS	BENAR	TDK BNR	SALDO	% KBNRN
1.	S/D 2005	235	235	52	183	0	22,13
2.	2006	322	322	136	186	0	42,24
3.	2007	163	146	29	118	9	23,38
4.	2008 SD TRIW III	145	76	34	42	69	44,74
JUMLAH		865	787	258	529	78	32,78

**REKAPITULASI LAPORAN s/d TAHUN 2008
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DISUSUN MENURUT UNIT ORGANISASI**

NO.	UNIT ORGANISASI	JML LAP	DP	TUNTAS	BENAR	TDK	SALDO	% KBNR
1	SETJEND	272	27	245	70	175	27	28,57
2	ITJEN	2	1	1	-	1	1	-
3	KESMAS	100	5	95	25	70	5	26,32
4	YANMED	271	24	247	89	158	24	36,03
5	P2PL	78	2	76	27	49	2	35,53
6	YANFAR	17	3	14	3	11	3	21,43
7	LITBANGKES	9	1	8	2	6	1	25,00
8	BPPSDMK	93	11	82	34	48	11	41,46
9	BUMN/Nondep	23	4	19	8	11	4	42,11
	JUMLAH	865	78	787	258	529	78	32,78

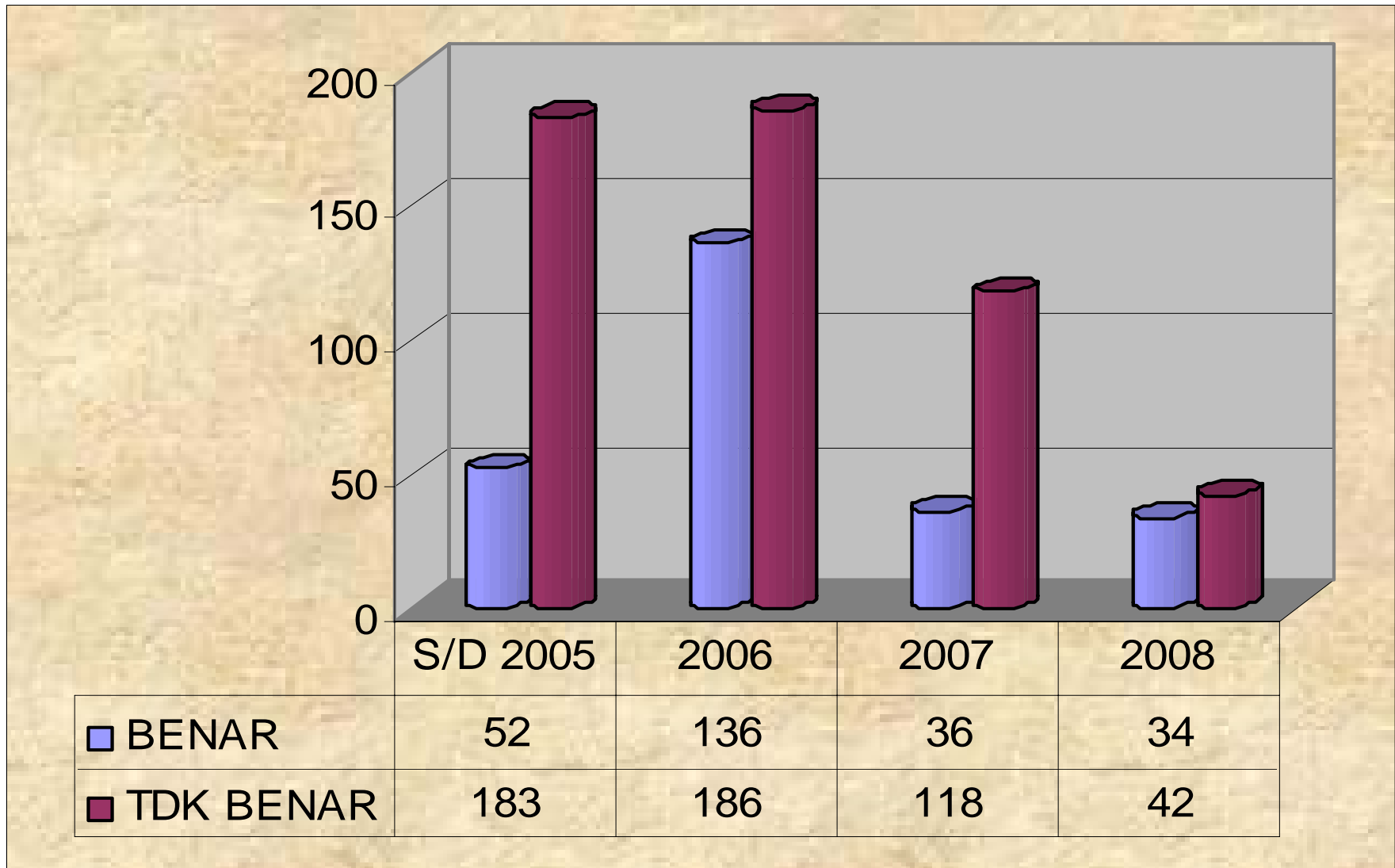
Perkembangan dan Penanganan Surat Dumas



■ Catatan :

Berdasarkan grafik tersebut diatas sejak tahun 2006 s/d tahun 2008 menunjukkan adanya penurunan surat DUMAS

Tingkat Prosentase Kebenaran



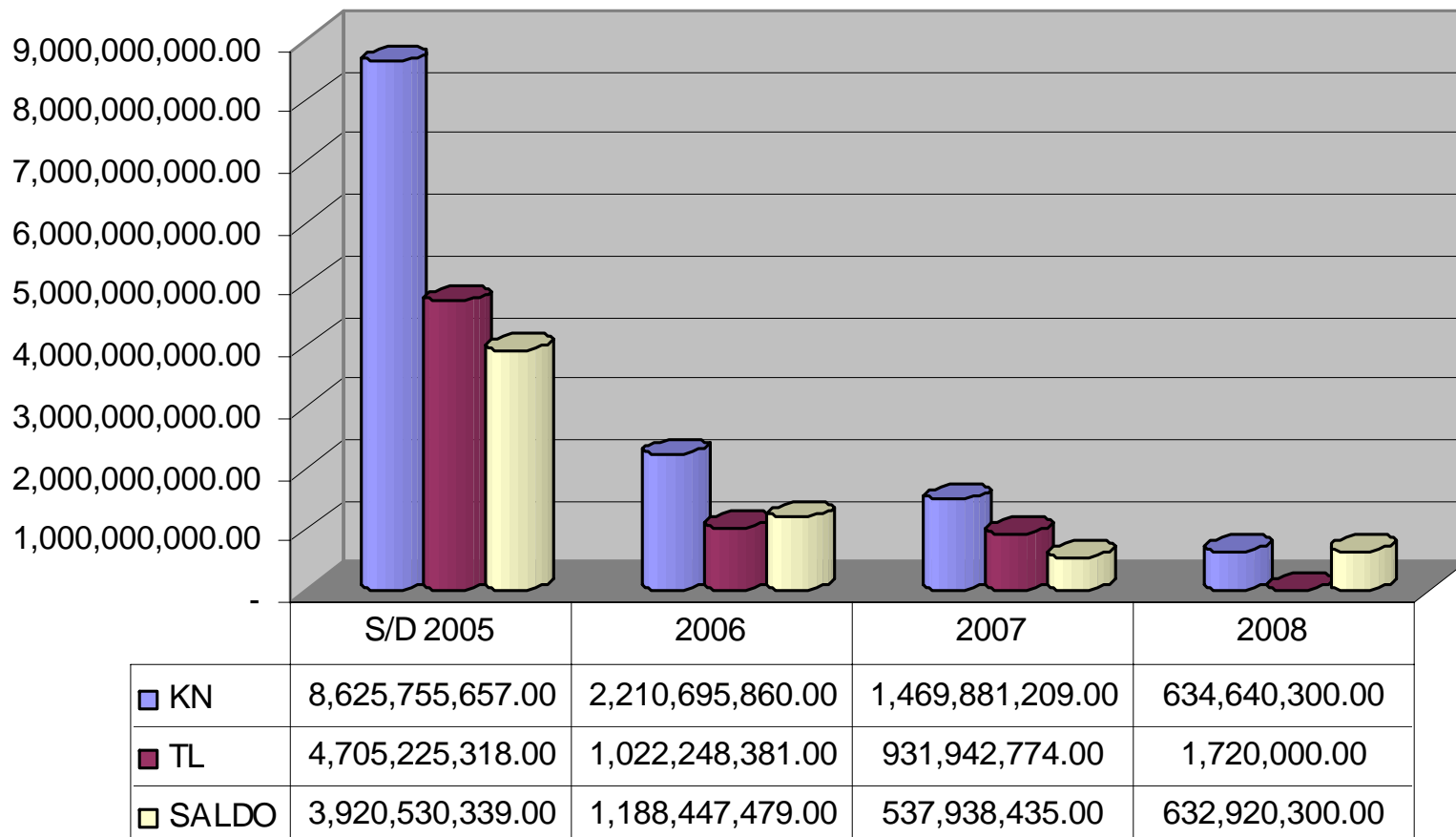
PERKEMBANGAN LHP KHUSUS ITJEN DEPKES S.D TRIWULAN III 2008

N O	TAHUN	LHP	TE M	SRN	KN	TINDAK LANJUT				SALDO			
						LHP	TEM	SRN	KN	LH P	TEM	SRN	KN
1	S/D 2005	115	448	740	8.625.755.657.71	84	382	635	4.705.225.318.71	31	66	105	3.920.530.339.00
2	2006	23	107	134	2.210.695,860.00	12	50	81	1.022.248.381.00	11	57	53	1.188.447.479.00
3	2007	14	53	53	1.469.881.209.00	10	39	39	931.942.774.00	4	14	14	537.938.435.00
4	2008	116	324	150	634.640.300,00	4	54	64	1.720.000.00	112	270	86	632.920.300.00
	JUMLAH	268	932	1077	12.940.973.026,71	110	525	819	6.661.136.473.71	158	407	258	6.279.836.553.00

PERKEMBANGAN LHP KHUSUS ITJEN DEPKES MENURUT UNIT UTAMA

NO	UNIT UTAMA	LHP	TEM	SRN	KN	TINDAK LANJUT				SALDO			
						LHP	TEM	SRN	KN	LHP	TEM	SRN	KN
1	SETJEND	120	287	163	1,550,915,880.00	26	83	117	633,207,460.00	94	204	46	917,708,420.00
2	YANMEDIK	75	352	494	5,256,221,585.71	43	224	355	2,194,147,480.71	32	128	139	3,062,074,105.00
3	BINA KESMAS	20	65	118	2,863,064,648.00	13	52	103	2,191,042,648.00	7	13	15	672,022,000.00
4	P2PL	28	115	178	2,476,153,205.00	13	81	150	1,425,015,285.00	15	34	28	1,051,137,920.00
5	BINA YANFAR	1	4	10	-	1	4	10	-	0	0	0	-
6	B. LITBANGKES									0	0	0	-
7	B. PPSDMK	24	109	114	794,617,708.00	13	80	83	217,723,600.00	11	29	31	576,894,108.00
	JUMLAH	268	932	1077	12,940,973,026.71	109	524	818	6,661,136,473.71	159	408	259	6,279,836,553.00

Perkembangan Tindak Lanjut Kerugian Negara HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS





FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

- Penanggungjawab LHP di Dinas / UPT berganti-ganti
- Belum baiknya kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya (Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota, BPKP)
- Kurangnya pemahaman terhadap prosedur penyelesaian tindak lanjut
- Kurangnya kepedulian pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut
- Tidak adanya komitmen dan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Tidak adanya reward / punishment pimpinan
- Saran yang bersifat administrasi kurang mendapat perhatian
- Adanya saran yang kurang tegas/jelas atau tidak tepat sasaran
- LHP sudah tuntas, hidup kembali (BPK dan BPKP) karena arsip tidak ada di bagian terkait
- Kurangnya daftar pendukung pelaksanaan tindak lanjut oleh Obrik
- Petugas yang harus menyelesaikan tindak lanjut tidak diketahui keberadaannya



REKOMENDASI

- KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA, DIREKTUR BLU-RS, KEPALA UPT DEPKES, KEPALA SATKER SEGERA MENINDAKLANJUTI SALDO HASIL PENGAWASAN YANG DISEDIAKAN DALAM CD YG TELAH DIBAGIKAN KEPADA MASING-MASING PROPINSI. PERKEMBANGAN/ PELAKSANAAN TINDAK LANJUT DIBAWA/DISERAHKAN DALAM RAKOR PENGAWASAN YG AKAN DILAKSANAKAN PADA MINGGU IV BULAN NOPEMBER.
- ITJEN BERSAMA APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL LAINNYA MENUNTASKAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI
- MENERUSKAN HASIL PENGAWASAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
- MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN



TERIMA KASIH